

1. Penilaian Kinerja Organisasi

Penilaian kinerja organisasi di Ditjen Pemasarakatan selama ini secara umum menyesuaikan dengan model LAKIP yang dikeluarkan oleh Menpan. Evaluasi LAKIP dilaksanakan berdasarkan Renstra yang disusun oleh Departemen Hukum dan HAM. Penyusunan Renstra Departemen selama ini belum berdasarkan assesment kebutuhan sesungguhnya dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan oleh karena itu kegiatan ini menjadi sangat penting untuk mengawali proses Reformasi Birokrasi Pemasarakatan

2. Postur Birokrasi 2025

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor ; M.HH.OT.02.02 tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan menyebutkan bahwa postur birokrasi Pemasarakatan secara umum kurang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan itu sendiri oleh karena itu kegiatan untuk menyiapkan postur birokrasi pemasarakatan harus menjadi prioritas utama pemasarakatan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal

3. Quick Win

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2008 dan 2009 dan assesment internal dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan, terlihat instansi Pemasarakatan belum maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat . Semangat untuk melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat dikembangkan juga dengan melakukan perbaikan pelayanan kepada warga binaan pemasarakatan dan perbaikan hubungan kerja dengan instansi penegak hukum lainnya. Kesadaran untuk memperbaiki kualitas pelayanan ini dipandang sangat penting diintegrasikan dalam kegiatan quick wins ini.